

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19

TERHADAP PENDAPATAN KEUANGAN DI POLITEKNIK

PELAYARAN SURABAYA

Sri Rahayu¹, Deni Supriatna²

²Mahasiswa Program Studi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

Email : d3nisarkan@gmail.com

¹Dosen Program Studi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Covid-19 merupakan jenis virus yang penyebarannya yang sangat cepat sekali, bisa tertular dari manusia ke manusia dari sistem pernapasan atau droplet. Beberapa Negara banyak memberlakukan *lockdown*, dengan tujuan memutus rantai penularan *Covid-19*. Menyebabkan jalur perekonomian terhambat dan menyebabkan perekonomian dunia porak-poranda, tidak terlepas pula perekonomian Negara Indonesia. Salah satu sektor ekonomi yang sangat berdampak oleh pandemi *Covid-19* adalah sektor perhubungan dalam hal ini industri pelayaran. Peneliti mengambil judul Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Pendapatan Keuangan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Dengan rumusan masalah yang di teliti adalah bagaimana dampak pandemi *Covid-19* terhadap pendapatan keuangan di Politeknik Pelayaran Surabaya? Tujuan peneliti adalah agar mengetahui relevansi terjadinya pandemi *Covid-19* dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politeknik Pelayaran Surabaya secara *kuantitatif* mengalami dampak penurunan pendapatan di masa Pandemi *Covid-19* ini hal ini banyak disebabkan karena faktor penurunan permintaan tenaga pelaut oleh perusahaan perusahaan perkapalan yang juga terkena dampak Pandemi *Covid-19*.

Kata kunci : *Covid-19; Pendapatan; Keuangan*

PENDAHULUAN

Pada bulan Desember 2019, Wuhan, Provinsi Hubei, melaporkan insiden pertama jenis pneumonia misterius, Meskipun asal sebenarnya dari penyakit itu masih belum pasti, pasar ikan Wuhan dianggap sebagai lokasi awal di mana penyakit itu ditemukan. Bulan lalu, penyakit ini menyebar ke negara-negara tetangga dan lebih banyak provinsi di China. Indonesia mengumumkan adanya Covid-19 pada 2 Maret 2020, dan teridentifikasi dua kasus. Covid-19 Jumlah kasus Jawa Timur belum menunjukkan

tanda-tanda melambat. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah terkonfirmasi positif di Jawa Timur naik 5.506. Menurut data terbaru, 298.525 orang di Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 saat ini. Di Jawa Timur, angka kesembuhan 3.987 pada hari yang sama. Di Jawa Timur, 221.778 pasien Covid-19 telah berhasil dirawat dan dipulangkan. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengalami kelesuan ekonomi sebagai akibat langsung dari peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia. Menurut Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, kisaran

antisipasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 adalah antara 0,4 persen hingga 1 persen. Menurut beberapa sumber lain, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus meningkat pada kuartal kedua. Dengan mengacu rata-rata pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya yang di atas 5 persen, Covid-19 telah menunjukkan penurunan (minus) 3,8 persen, dan diperkirakan penurunan ekonomi Indonesia akan terus terjadi hingga tahun 2021. The International Monetary Fund (IMF), di sisi lain, memperkirakan ekonomi Indonesia akan meningkat sekitar 6 persen pada tahun 2022, dengan berbagai poin termasuk fakta bahwa aktivitas ekonomi telah kembali sepenuhnya. Di sisi lain, sejumlah pakar ekonomi lainnya sependapat dengan penilaian bahwa kesulitan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud hingga tahun 2022. Pandemi akibat virus Covid-19 bukan hanya berakibat negatif pada kesehatan masyarakat, tetapi itu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dunia dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamar Perkapalan Internasional, perusahaan pelayaran bertanggung jawab untuk mengangkut barang-barang yang membentuk sekitar sembilan puluh persen dari seluruh nilai semua perdagangan internasional. Covid-19 telah mengurangi kapasitas dan utilisasi kapal. Menurut sumber teknologi kapal, 21 rute perdagangan Amerika telah dibatalkan. Rendahnya permintaan untuk transportasi komoditas China di Asia Pasifik adalah penyebabnya. Pembatalan ini merupakan tambahan dari enam puluh enam pembatalan yang telah terjadi sehubungan dengan perayaan Tahun Baru Imlek di tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada jalur perdagangan antara Asia dan Eropa; total 61 perjalanan harus dibatalkan, yang berarti penurunan kapasitas 151.000 TEU.

Mayoritas perusahaan pelayaran paling signifikan di dunia, termasuk Maersk dan Hapag Lloyd, telah mengalami kerugian finansial yang signifikan sebagai akibat langsung dari munculnya Covid-19. Maersk memperoleh sekitar 30 persen dari kargo pengiriman tahunannya dari aktivitasnya di China, sementara Hapag-Lloyd memperoleh sekitar 25 persen dari pendapatan grupnya dari operasinya di China. Hal ini menunjukkan bahwa baik Maersk maupun Hapag Lloyd mungkin saja mengalami kerugian dalam transaksi tersebut. Perjalanan bahari penumpang mengalami penurunan signifikan sejak pandemi Covid-19 dan penetapan kebijakan PSBB/PPKM di banyak lokasi. Sebaliknya, biaya operasional kapal dikeluarkan secara terus-menerus dan mencakup pembayaran pokok dan bunga atas investasi dan pembayaran pinjaman bank. Akibat pembatasan pengoperasian kawasan industri di kawasan tertentu, terdapat pula kawasan angkutan peti kemas yang mengalami penurunan volume kargo dibandingkan bulan terdahulu. Kendala selanjutnya bagi individu di sektor angkutan peti kemas adalah pembayaran tagihan pelanggan. Sebaliknya, kegiatan industri, terutama yang berkaitan dengan masalah keselamatan, harus terus dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Di beberapa zona transportasi laut tersebut, dampak COVID-19 yang melumpuhkan sejumlah zona ekonomi telah menimbulkan himpitan dan tekanan yang luar biasa. Sebagai hasil dari upaya Covid-19, diharapkan pemerintah segera melaksanakan relaksasi pinjaman. Mengupayakan tindakan terus menerus yang diambil dengan cepat dan tepat, sambil mengambil risiko yang dapat diukur. Dimana tidak bisa lagi ditunda, secepat mungkin, dalam hal penyelesaian paket kebijakan yang ditinggalkan pemerintah terdahulu, seperti insentif pajak. Apabila hal ini tidak terwujud, kondisi arus kas negatif yang ada saat ini dan yang akan terjadi dalam waktu dekat akan

berdampak pada keputusan perusahaan untuk menghentikan operasinya, yang akan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kembali industri perkapalan yang merupakan komponen penting dari infrastruktur maritim bagi negara seperti Indonesia yang terletak di lingkungan maritim.

TINJAUAN PUSTAKA

Dikutip dari Hans Kartikahadi,dkk (2016:3) pengertian Akuntansi adalah suatu susunan informasi keuangan, yang berguna untuk membuat serta mengungkapkan penjelasan yang selaras bagi berbagai kelompok yang terkait. Pengertian akuntansi menurut jr. Walter (2012:3) pengertian akuntansi adalah Suatu sistem informasi yang melaksanakan dan menilai kegiatan bisnis, mengolah data menjadi sebuah laporan, dan menginformasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat sebuah keputusan yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Harahap (2011:5) mengatakan bahwa : Akuntansi adalah melibatkan banyak angka yang akan dijadikan sumber dalam tatacara pengambilan keputusan, angka itu dapat berupa uang atau nilai moneter yang sebagai representasi catatan dari transaksi suatu perusahaan. Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2014:2-3) informasi akuntansi itu memiliki tiga tujuan yaitu memberi pelaporan kepada manajemen untuk : Membuat keputusan-keputusan berkelanjutan bisnis (kegiatan operasi) dan keputusan-keputusan khusus (investasi jangka panjang). Menyampaikan suatu pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan yaitu rekanan pajak, pemilik saham, serta instansi keuangan dan lain-lain. Memberi suatu keterangan kepada berbagai tingkatan manajemen. Akuntansi berguna sebagai sarana untuk memberikan keterangan berupa data-data atau transaksi keuangan bagi perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua jenis

informasi perihal perusahaannya yaitu perihal informasi terkait dengan nilai perusahaan dan informasi mengenai tentang laba/rugi usaha. Untuk memperoleh informasi tersebut user hendaknya melakukan tindakan pencatatan secara teratur berkaitan transaksi-transaksi dari setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dicantumkan dalam satuan uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan pekerjaannya. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai standar dalam penelitian karena dapat membuat data deskriptif dari sumber (orang) atau perilaku yang diamati dalam bentuk tuturan tertulis atau lisan. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan dapat mencakup fakta-fakta yang memerlukan studi mendalam. Oleh karena itu, metode kualitatif lebih cenderung menghasilkan data yang lebih komprehensif, terutama ketika seorang peneliti hadir di lapangan. Bagian penting dari penelitian kualitatif adalah menggunakan peneliti sebagai sumber utama pengetahuan tentang alat atau objek yang diselidiki. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, peneliti akan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kaitannya dengan situasi yang diteliti. Disertasi ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mempertimbangkan kemungkinan data faktual dari lapangan. Menggunakan metode statistik dapat meningkatkan akurasi data, yang penting bagi seorang peneliti yang bekerja. Penelitian kuantitatif dan interaksi jangka panjang dengan objek atau instrumen untuk mengumpulkan data.

1. Populasi

Peserta program pelatihan, serta anggota staf layanan pendaftaran pendidikan dan pelatihan dan departemen akademik termasuk dalam populasi penelitian ini

Tabel 1. Jumlah Pegawai Per Bagian

No	Nama Unit	Jumlah pegawai
	Sub bagian Keuangan	14
2	Sub Bagian Akademik	20
3	Unit Diklat Keterampilan	12
4	Customer Service	8
5	Peserta diklat	± 125 / hari

1. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti atau berfungsi sebagai sampel yang representatif. Penjelasan tentang tempat sampel di masyarakat diberikan oleh Arikunto (2012:56).

(sebagai wakil dari populasi yang diteliti). Dengan menggunakan sampel populasi sebagai sumber informasi, peneliti dapat memperkirakan demografi populasi.

Table 2. jumlah sample dari pegawai

No	Nama Unit	Jumlah pegawai
1	Subbagian Keuangan	5
2	Sub Bagian Akademik	8
3	Unit Diklat Keterampilan	5
4	Customer Service	6

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku- buku yang ada kaitannya dibidang manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dilanjut dengan studi lapangan yaitu mencari dan memperoleh data dari instansi dan para pegawai sebagai responden yang penulis teliti, Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena terhadap yang ada pada objek penelitian. Observasi juga suatu cara yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua di antara yang terpenting proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan mengamati jenis atau variabel apa saja yang mempengaruhi pendapatan di Politeknik

Pelayaran Surabaya dimana peneliti melakukan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden (narasumber) secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah serta hipotesis penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara bertatap muka secara langsung dengan pelaku bagian terkait langsung dengan pendapatan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Untuk melengkapi data peneliti juga menyebarkan kuesioner cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara tertulis dengan menyebarkan angket dan disertai dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden pada saat jam kerja. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi

adalah dengan cara mencari data-data atau informasi pada buku-buku, catatan-catatan tanskrip, jurnal, makalah dan lain sebagainya serta mengambil foto-foto ketika proses wawancara dengan responden berlangsung dan kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut sebagai bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terjun ke lapangan. Teknik pengambilan data dengan metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengambilan data dengan metode lain seperti angket, wawancara, observasi, ataupun sejenisnya.

data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan (Sugiyono :2014) berpendapat bahwa narasumber sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayatinya. Mereka yang termasuk masih terjun atau terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti. Mereka yang memiliki waktu luang untuk memberikan informasi. Mereka yang tidak cenderung memberikan keterangani hasil "kemasannya" sendiri. Mereka yang pada awalnya termasuk sebagai orang yang "cukup asing" akan peneliti sehingga lebih lanjut memotavasi untuk dijadikan sebagai contoh atau narasumber. Data sekunder adalah data yang berasal dari proses pengerjaan instansi atau suatu lembaga tertentu, diperuntukkan buat kepentingan lembaganya dan juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang dipakai untuk membahas hasil penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip data tentang pendapatan keuangan dari jumlah diklat berdasarkan peserta diklat yang tercatat sebagai pengguna jasa dimasa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di instansi yang terkait. Untuk pengolahan data lebih merujuk

kepada data primer sehingga antara data primer dan data olahan tidak bertentangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengkhhususkan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan alurnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dari berbagai sumber data yang ada maka peneliti melakukan short data atau menyaring data yang relevan dengan penelitian dan topik masalah serta merangkum data-data yang dapat mempertajam hasil penelitian. Adapun data yang direduksi dari narasumber penelitian diantaranya : Data yang bersumber dari unit akademik terkait dengan pelaporan jumlah sertifikat yang tercetak dan alur proses atau flowchart pendaftaran diklat hingga proses pendistribusian dilakukan dengan mengambil data utama saja.

1. Data yang bersumber Dari unit Diklat Keterampilan terkait data jumlah peserta diklat, pengambilan data hanya memuat akumulasi jumlah peserta diklat pertahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
2. Pengambilan data dari Sub Bagian Keuangan memuat total nominal target dan capaian dari target pert tahun periode 2018 sampai dengan tahun 2018.
3. Data dari kepegawaian merangkum data jumlah pegawai yang masuk dalam object penelitian sebagai narasumber serta berkaitan dengan penelitian.
4. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, skema, serta hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif sehingga mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Pada penelitian ini data disajikan dengan membuat gambaran atau perbandingan antara masa sebelum pandemi dengan masa dimana pandemi masih terjadi, sehingga hasil dari data yang ditampilkan lebih mudah di analisis dan

dapat digambarkan dengan jelas. Adapun data disampaikan dalam bentuk flowchart dan tabel serta penjelasannya dapat kita lihat dalam sub bab pembahasan.

Pengujian serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Concluctions). Menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pengujian terhadap kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam analisis data suatu penelitian tersebut. hipotesa yang digunakan sifatnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti lebih kuat dan mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. jika suatu kesimpulan yang ditarik pada tahap awal diperkuat oleh bukti yang kuat dalam arti tetap dalam dengan kondisi yang ditemukan pada saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh adalah merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kali ini lebih cenderung menggunakan data yang telah ada dan diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan adapun dasar penarikan kesimpulan dapt dilihat dari data tabel perbandingan maupun dari grafik yang di buat untuk lebih mendeskripsikan hasil temuan dalam penelitian sehingga kesimpulan dapat lebih menggambarkan hasil atau pun proses penelitian itu sendiri adapun sumber data yang dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengambil kesimpulan diantaranya data yang bersumber dari berbagai narasumber Unit atau Bagian terkait sebagai objek penelitian, yaitu :

1. Sub Bagian Keuangan dengan data target dan capaian keuangan.
2. Sub Bagian Akademik dengan data jumlah sertifikat yang tercetak dan mekanisme proses nya.
3. Unit Kepegawaian dengan data jumlah pegawai yang terkait.
4. Unit Diklat dan Keteampilan Pelaut dengan jumlah peserta yang telah mengikuti diklat keterampilan di Politeknik Pelayaran Surabaya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Sebagai anggota Organisasi Maritim Internasional, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Pelaut (STCW) 1978 dan amandemen selanjutnya (IMO). Proses pembelajaran, serta pelatihan dan keterampilan bagi pelaut, dijelaskan, serta berbagai elemen peri yang berhubungan dengan laut. Proses ini disebut sertifikasi keterampilan karena peserta pelatihan yang memenuhi kriteria mendapatkan Certificate of Proficiency (COP) dan Competence (COC). Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaut, dan Keputusan Menteri Nomor KM. 18/1997 tentang Tata Cara Pelatihan, Ujian Kelautan, dan Sertifikasi Pelaut mengatur sertifikasi pelaut berdasarkan revisi konvensi ILO no. 185 Tahun 2003, dan MLS 2006 dan 1978 STCW (Indra Priyatna, 2006). Lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat izin atau persetujuan dari Kementerian Perhubungan adalah satu-satunya yang berwenang untuk melaksanakan prosedur penerbitan sertifikat. Tim khusus yang terdiri dari pejabat dan pekerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut melakukan audit pra-proses. Setelah memperoleh persetujuan lembaga pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan sertifikasi tunduk pada pemantauan dan pengawasan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan. Beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan dikelola oleh pemerintah, sementara yang lain dimiliki atau dioperasikan oleh swasta. Hal ini berdampak positif karena dapat mendorong persaingan dalam hal pengembangan layanan, termasuk layanan pendaftaran, kualifikasi mengajar, dan ketepatan waktu penerbitan sertifikat, untuk menjamin keberlanjutan setelah sertifikasi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi telah mencapai syarat-syarat esensial untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam skenario khusus ini, tindakan yang diambil oleh Politeknik Pelayaran Surabaya (POLTEKPEL) untuk menanggapi permintaan pelaut yang kompeten dan dapat diandalkan termasuk fakta bahwa, Sekitar 75.500 lulusan dari berbagai program, serta peningkatan keterampilan dan keahlian khusus pelaut, lulus dari Politeknik Pelayaran Surabaya antara tahun 1982 dan 2012. (DKKP).

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, alinea keempat, mengacu pada pedoman yang harus diikuti. Menteri Perhubungan perlu menerbitkan peraturan yang menetapkan pedoman sistem akuntansi keuangan (PSAK) Politeknik Pelayaran Surabaya agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Organisasi Layanan Umum (BLU).

POLTEKPEL BLU Surabaya membutuhkan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia (IAI) dan peraturan menteri dalam rangka memenuhi akuntabilitas keuangan berdasarkan PK-BLU. Karena ada oknum pelaut yang melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen negara berupa sertifikat maritim yang diperkirakan merugikan, ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam penegakan hukum terkait profesi maritim di negara kita. Akibatnya, pendapatan industri kelautan akan terpengaruh, dan citra publiknya dapat ternoda. Pada tahun 2020, negara diproyeksikan mencapai miliaran rupiah. Ini adalah badan yang berwenang menjatuhkan sanksi bagi pelaut yang melanggar kode etik kelautan sampai nomor pelaut dibekukan. yang melanggar kode berisiko memiliki lisensi ditangguhkan atau dicabut.

Pembangunan Politeknik Pelayaran Surabaya berlangsung pada:

1. Organisasi ini berasosiasi dengan BPLP Semarang (sekarang PIP Semarang) dari tahun 1982 hingga 1990. BPLP Semarang

menyelenggarakan program pendidikan kelautan untuk disiplin ilmu teknik dan navigasi nautika selama periode tersebut (Strata A).

2. Antara tahun 1990 dan 2002, berganti nama menjadi Balai Pendidikan dan Pengajaran Dasar (BPLPO), dan tanggung jawab utamanya bergeser menjadi pendidikan perwira pelayaran niaga dan awak kapal pada tingkat penilaian yang paling mendasar.

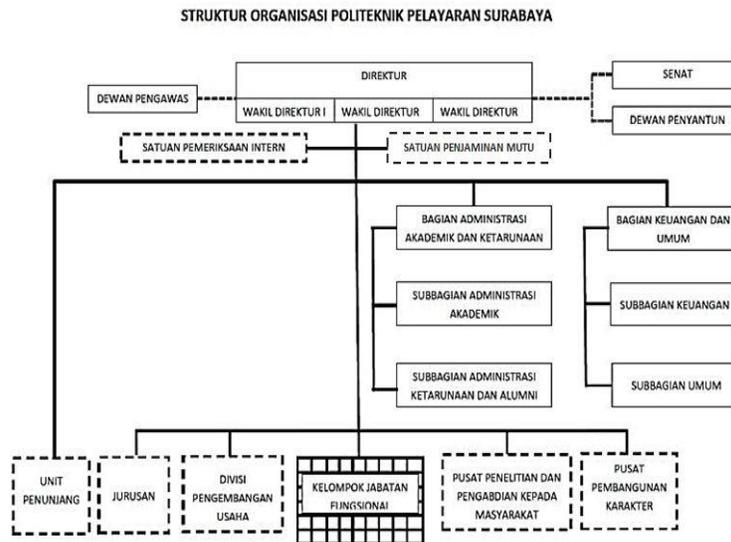
Mendidik perwira perdagangan pelayaran Indonesia (ANT, ATT-IV), serta karyawan pemeringkat untuk domain teknis dan bahari, ia menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya (BP2IP) pada tahun 2002 dan menjabat dalam kapasitas itu hingga 2013.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN) Nomor B/70/M.PAN-RB/1/2013, Surat Ditjen Dikti Nomor 1487/E/T/2012 tentang Pendirian persetujuan persetujuan Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya, dan Peraturan Menteri Perhubungan Norn atau PM.14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BP2IP Surabaya berubah nama menjadi Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL).

Visi Politeknik Pelayaran Surabaya : Mendirikan lembaga pendidikan transportasi laut berkaliber tertinggi di dunia.

Misi Politeknik Pelayaran Surabaya adalah mendidik dan melatih orang-orang di bidang pelayaran sesuai standar nasional dan internasional.

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sebagai lembaga penyelenggara Pelatihan Keterampilan Kelautan (DKP) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki perangkat peraturan perundang undangan untuk menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal ini di tunjang juga dengan beberapa komponen sebagai pelaksanaan layanan diklat dari beberapa unsur atau bagian unit yang menjalankan kegiatan.



Gambar 1. Organisasi Politeknik Pelayaran Surabaya

1. Penelitian

Perkembangan dunia pelayaran yang begitu pesat, berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan tenaga pelaut dan tenaga ahli kepelabuhan dan sangat mempengaruhi kelangsungan lembaga pendidikan kepelautan khususnya Politeknik Pelayaran Surabaya. Fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset Negara.

Semakin berkembangnya suatu organisasi karena itu diperlukan Sistem Akuntansi Keuangan guna memperbaiki informasi yang telah dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengetahui mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi dan juga memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern untuk memperbaiki tingkat kehandalan (realibility) informasi dan untuk menyediakan catatan lengkap sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang tepat guna, lengkap dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Perkembangannya organisasi serta perencanaan kerja yang sudah ditetapkan tidak serta merta dapat berjalan mulus

hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun external.

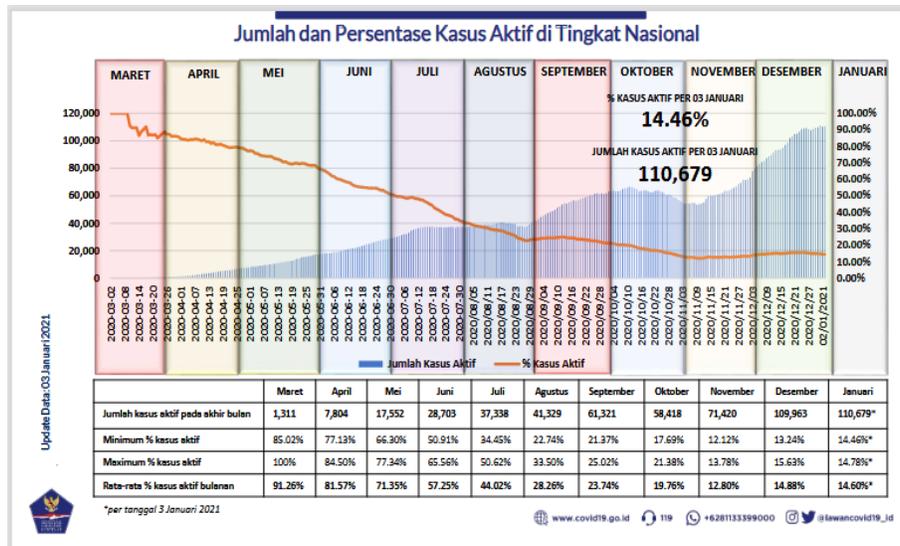
Seiring dengan peningkatan kasus positif Covid-19 secara global, hal ini mengakibatkan terjadinya guncangan perekonomian dimana-mana, Indonesia salah satunya. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan yaitu Adi Budiarmo menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada 2020 diperkirakan hanya 0.4% sampai dengan 1% saja, bahkan sumber lain menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengestimasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal II Covid-19 mengalami penurunan (minus) 3.8% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun-tahun sebelumnya yaitu di atas 5%, dan diprediksi bahwa perlambatan laju perekonomian di Indonesia masih akan terjadi hingga tahun 2021. Berhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 kemudian menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan menurun tajam. Dengan demikian, analisis mendalam dari kinerja keuangan dan kinerja

layanan BLU, dalam konteks penelitian ini, tentu sebuah topik menarik untuk diteliti kebenarannya. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi karena investasi terhambat, kegiatan pelayanan publik mengalami kontraksi yang kuat. Literatur yang membahas hal ini Tekanan tersebut mulai terasa dampaknya pada kinerja perekonomian triwulan pertama tahun 2020 yang hanya tumbuh 2,97 persen atau pertumbuhan triwulan I terendah sejak tahun 2001. Berdasarkan realisasi tersebut maka proyeksi perekonomian yang semula diharapkan dapat tumbuh dengan basis 2,3 persen di tahun 2020 diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran negatif 0,4 persen sampai dengan 2,3 persen dengan kecenderungan lebih rendah dari batas atas (Thomas, 2020). Tekanan tersebut pasti berdampak pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia yang saat ini berjumlah 243 satker yang terbagi atas lima rumpun layanan: (1) 105 satker layanan kesehatan; (2) 100 satker layanan pendidikan; (3) 5 satker pengelola kawasan; (4) 8 satker pengelola dana; dan (5) 25 satker layanan barang dan jasa lainnya. Pandemi Covid-19 terus masih terbatas, padahal salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi pemerintah (dalam konteks BLU adalah kinerja layanan) adalah penggunaan sumber daya yang dapat dinilai dengan melihat nilai belanja pada sektor publik. Rajkumar & Swaroop(2008) meneliti dampak belanja sektor publik terhadap outcome dalam bidang layanan dan pendidikan dengan menggunakan data cross-sectional pada empat tahun yang berbeda: 2018, 2019, 2020 dan 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara belanja sektor publik dan outcome di bidang layanan dan pendidikan dengan catatan bahwa negara tersebut memiliki tata kelola yang baik.

Mayoritas satker BLU Lainnya berada di kuadran 1 menunjukkan proyeksi rasio mengalami penurunan. Beberapa satker yang terkena dampak melakukan self assessment dan mempredisikan tidak dapat memenuhi beberapa target pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2020. Berdasarkan hasil diskusi dengan pembina keuangan dapat disimpulkan bahwa satker BLU harus mengajukan perubahan dan renegotiasi kontrak kinerja sehubungan dengan proyeksi ketidak tercapaian indikator kinerja layanan akibat Covid-19. Dampak Covid19 yang terjadi pada BLU bidang Penyedia Barang/Jasa Lainnya, seperti, Politeknik Pelayaran Surabaya (POLTEKPEL) sebagai satker BLU.

Efek ketakutan yang terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan dampak selain dari sektor ekonomi juga berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat. Ini di sebabkan juga karena pemerintah menerapkan beberapa himbaun untuk memutus rantai penularan Covid-19 seperti fisik distancing, social distancing dan masyarakat di anjurkan untuk di rumah aja (stay at home). Hal-hal demikian bisa menimbulkan renggangnya kehidupan sosial bermasyarakat, karena kegiatan yang semula terjadi dalam keseharian dalam menjalankan kehidupan sekarang harus di batasi. Efek dari pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru demi menjaga kesehatan bersama agar tidak tertular dan bisa memutus rantai penyebaran dari Covid-19 ini. Kebiasaan baru tersebut meliputi wajib pakai masker jika melakukan aktivitas di luar, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak.

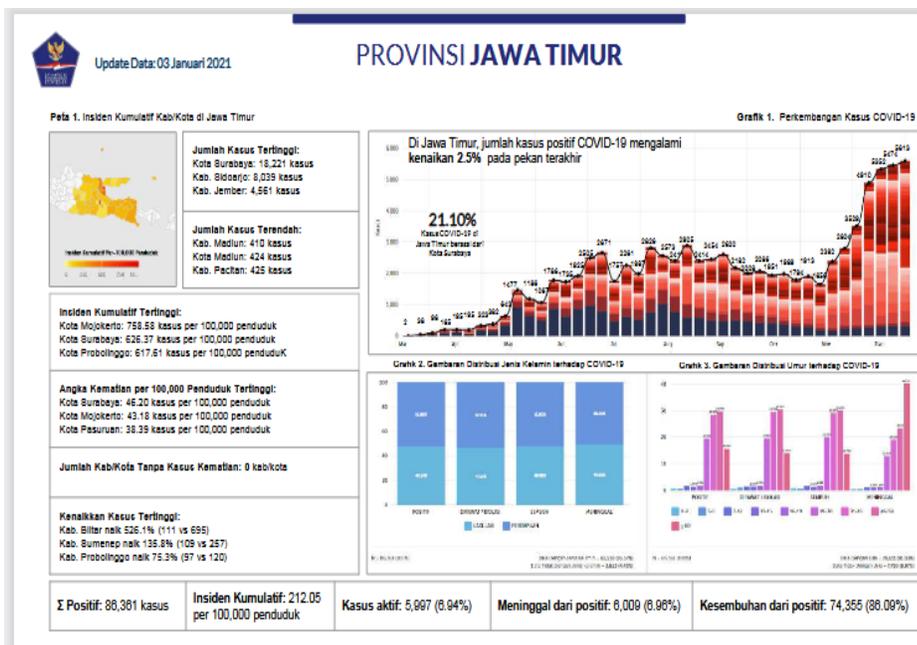
Bahwa penyebaran secara nasional banyak terdapat di pulau Jawa dan Bali yang mana pemberlakuan PPKM sangat ditekankan di pulau tersebut. Dari data satuan tugas penanganan Covid-19 dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 1 Grafik Persentase kasus Aktif ditingkat Nasional

Mengingat angka tersebut masih cukup tinggi untuk kasus aktif nasional, pemerintah harus membuat kebijakan yang dinilai mampu memperlambat laju peningkatan jumlah kasus Covid-19 di seluruh tanah air. Terlihat dari grafik

(update: Januari 2021), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur baru saja mengeluarkan data yang menunjukkan jumlah kasus masih terus bertambah.



Gambar 3. Grafik Persentase kasus Aktif wilayah Jawa Timur

Terlihat dari data kasus Covid-19 yang dipaparkan terdahulu, dampaknya cukup signifikan bagi pertumbuhan dunia usaha di

berbagai bidang yang berbeda. Dalam kasus khusus ini, peneliti mencoba untuk menyelidiki hubungan antara pandemi dan pendapatan

finansial di Politeknik Pelayaran Surabaya, serta dampak yang ditimbulkan oleh hubungan atau dampak ini.

Prosedur pendaftaran pelatihan online Politeknik Pelayaran Surabaya yang tersedia melalui aplikasi SIPOPEYE untuk pendaftaran pelatihan online digunakan untuk melaksanakan dan mendaftarkan pelatihan. Ini merupakan salah satu pendekatan taktis yang ditempuh untuk memitigasi dampak atau pengaruh penyebaran Covid-19. Salah satu tujuan dari tahapan ini adalah untuk memudahkan calon peserta diklat untuk mendaftar tanpa saling berinteraksi atau menimbulkan kemacetan di area pelayanan diklat Politeknik Pelayaran Surabaya.

Karena berbagai kendala terkait teknologi dan implementasi, sistem ini tidak selalu berfungsi dengan baik. Masalahnya adalah sebagai berikut:

Pengguna layanan yang juga dikenal sebagai calon peserta pelatihan ini berasal dari berbagai kalangan yang berbeda, sehingga tidak semua memahami cara menggunakan layanan aplikasi ini.

Tidak ada jaminan bahwa sistem akan selalu berfungsi dengan sempurna.

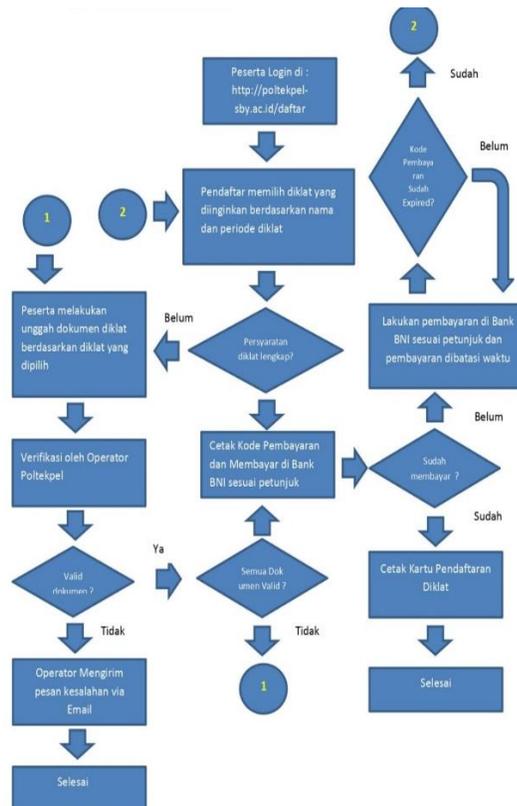
Datang langsung ke area layanan pelatihan biasanya lebih disukai oleh calon peserta karena tingkat ketergantungan atau cara berpikir yang lebih tinggi terhadap lingkungan. Ketika calon peserta pelatihan berada di laut, ada kendala pada jaringan. Keterbatasan internal seperti pemeliharaan dan koneksi internet yang dinonaktifkan sementara. komplikasi pada lembaga keuangan yang menjadi mitra. Untuk melawan pandemi saat ini, setiap bisnis, baik milik

pemerintah maupun swasta, perlu membuat terobosan atau ide-ide baru untuk tetap berbisnis dan tumbuh secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan suatu prosedur atau sistem informasi yang jelas dan terorganisir agar masyarakat luas yang mungkin ingin menggunakan jasa kami dapat dengan mudah memahaminya. Secara khusus Politeknik Pelayaran Surabaya telah membuat sistem online untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar diklat dan mengikuti diklat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai bagian dari sistem informasi yang mereka buat, Politeknik Pelayaran Surabaya dapat menggunakan platform media sosial, website, pamflet, atau brosur. Di masa pandemi, 80% masyarakat yang bisa ikut bertanya tentang proses pendaftaran online. Ini adalah salah satu masalah yang dapat terjadi ketika menempatkan sistem online pada tempatnya.

Objek tersebut menggunakan sistem yang dibuat agar masyarakat dapat mendaftar diklat tanpa harus datang langsung ke area Politeknik Pelayaran Surabaya. Ini membantu menghentikan penyebaran Covid-19 dan memastikan bahwa protokol kesehatan yang direkomendasikan pemerintah diikuti dan dijalankan.

Dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Poltekel Surabaya juga menerapkan sistem akses masuk ke dalam kampus di satu pintu dan melakukan pengecekan suhu badan kepada setiap pengunjung yang akan melakukan diklat. Serta melakukan pembatasan orang atau jumlah peserta yang ikut dalam antrian disetiap harinya.

Gambar 4. Aplikasi Pendaftaran Diklat Online



Gambar 5. Proses Pendaftaran

Biaya dan Jadwal Diklat

Ada yang mengacu pada regulasi terbaru sesuai dengan ketentuan kementerian, ada pula yang tetap mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 58/PMK.05/2016 tentang Biaya Pelayanan Pelayanan Publik Politeknik Surabaya Badan pada Kementerian Perhubungan untuk biaya pelatihan dan pendidikan di Poltekel Surabaya tahun 2020.

Tabel 3 Biaya Diklat Keterampilan Pelaut (DKP) Poltekel Surabaya

PROGRAM	PERIODE DIKLAT	BIAYA DIKLAT (RP)	REVALIDASI
BST	9 hari	1.798.000	420.000
AFF	4 hari	1.262.000	420.000
CMT & CMHBT	3 hari	1.219.000	420.000
ECDIS	5 hari	1.284.000	420.000
RADAR	6 hari	1.340.000	420.000
SSO	3 hari	970.000	420.000
ERM	4 hari	1.275.000	420.000
SATSDSD	2 hari	623.000	420.000
ARPA	4 hari	1.205.000	420.000
BST KLM	3 hari	808.000	420.000
PSCRB	4 hari	965.000	420.000
MFA	3 hari	1.205.000	420.000
BOCT	6 hari	1.405.000	420.000
BRM	5 hari	1.150.000	420.000
SAT	1 hari	635.000	420.000
AOTCO	7 hari	1.735.000	420.000
ACT	6 hari	1.470.000	420.000
IMDG-CODE	4 hari	1.255.000	420.000
ISM-CODE	1 hari	585.000	420.000
MC	5 hari	1.405.000	420.000
GMDSS	10 hari	2.286.000	950.000
RATING DEK	1 bulan	1.635.000	420.000
RATING ENGINE	1 bulan	1.624.000	420.000
ABLE DECK	1,5 bulan	2.492.000	420.000
ABLE ENGINE	1,5 bulan	2.558.000	420.000

Seperti terlihat dari data di atas, lamanya masa pelatihan serta sarana dan prasarana yang tersedia pada saat pelaksanaannya berdampak pada laju program pelatihan.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut

Diklat, yang merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan, merupakan akronim. Pengetahuan dan keterampilan pelaut dapat ditingkatkan melalui berbagai teknik untuk

mengembangkan kemampuan yang mempromosikan keselamatan maritim.

Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa ada banyak penanda dalam pelatihan dalam hal ini, khususnya:

Saat memilih pelatih untuk mengajar konten, instruktur harus memiliki keterampilan yang tepat untuk bidang keahliannya, bersikap ramah, dan tahu apa yang mereka lakukan, sehingga pelatih dapat fokus dalam membangun

keterampilan orang. Agar pelatihan dapat terlaksana, pelatih juga harus memiliki jenis pelatihan yang tepat.

Sesuai protokol, peserta pelatihan harus dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan kredensial yang relevan, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.

Kurikulum atau materi pelatihan sumber daya manusia dibuat agar sesuai dengan tujuan program dan hasil yang ingin dicapai oleh bisnis. Materi pelatihan harus selalu up-to-date agar masyarakat dapat memahami isu-isu yang muncul dalam situasi yang dihadapi.

Metode itu sendiri dan keberlangsungan kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif merupakan jaminan bagi teknik yang digunakan, sepanjang sesuai untuk peserta pelatihan yang berbeda dan bagiannya yang berbeda.

Pelatihan memiliki serangkaian tujuan, yang sebagian besar berkaitan dengan memuat rencana aksi (action play), penargetan, dan apa yang seharusnya dicapai oleh pelatihan. Agar orang yang mengikuti pelatihan dapat memahaminya, tujuannya juga harus dijelaskan.

Target pelatihan adalah target, dan itu adalah sesuatu yang dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dan terukur. Dalam pelaksanaan dan menjalankan diklat keterampilan bagi para peserta yang telah memenuhi kriteria sebagai calon peserta diklat maka sebagai Unit Pelayanan Terpadu Politeknik Pelayaran Surabaya selalu mengikuti aturan yang berlaku secara nasional dan Internasional misalnya dalam hal ini Politeknik Pelayaran Surabaya selalu mengacu pada ketentuan standar kepelautan internasional yang tertuang dalam SCTW (Standard Training Certificated Watchkeeping) adalah aturan internasional yang direvisi di Manila pada tahun 2010 dan telah direkomendasikan oleh Direktorat Perhubungan Laut untuk digunakan di Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai acuan dalam memenuhi standar kualifikasi seorang pelaut untuk melakukan tugasnya sebagai pelaut baik didalam negeri maupun di luar negeri. Menurut informasi yang peneliti gali dari Unit Diklat Keahlian Pelaut, sebagai berikut data target dan hasil aktual peserta Diklat Keahlian Pelaut dari tahun ketahun terctat sejak tahun 2018 hingga 2021 dapat di gambarkan sebagai beriku:

Tabel 4. Data Peserta Diklat Keterampilan Pelaut dari th 2018-2021

DATA JUMLAH PESERTA DIKLAT DARI TAHUN 2018-2021															
TARGET	2018			TARGET	2019			TARGET	2020			TARGET	2021		
	REALISASI				REALISASI				REALISASI				REALISASI		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
58305	39949	1382	41331	50765	47678	1364	49242	38084	22193	948	23141	39345	28083	240	28323

Dari data tabel 4.3 terlihat selisih dan perbandingan jumlah data peserta dari tahun sebelu pandemi dan dimasa pendemi tabel diatas merupakan sebagian sumber data dari Unit Diklat Keterampilan yang diperoleh dari narasumber langsung seta mengacu pada data primer terhadap jumlah peserta dalam masa dan peridode sebelum pandemi dan di masa pandemi Covid-19.

Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang validasi instrumen, analisis data observasi tingkat, dan analisis data peserta diklat di Politeknik Pelayaran Surabaya. memberikan indikasi jumlah total orang yang mengikuti pelatihan. Peneliti bertanggung jawab untuk melakukan penelitian serta mengumpulkan data dari sumber yang relevan. Setelah mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber, maka perlu dilakukan analisis terhadap informasi tersebut agar dapat ditarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh sumber-sumber terkait, responden sangat terbuka dengan peneliti mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti dapat menginterpretasikan data yang akuntabel dan akuntabel dalam konteks ini.

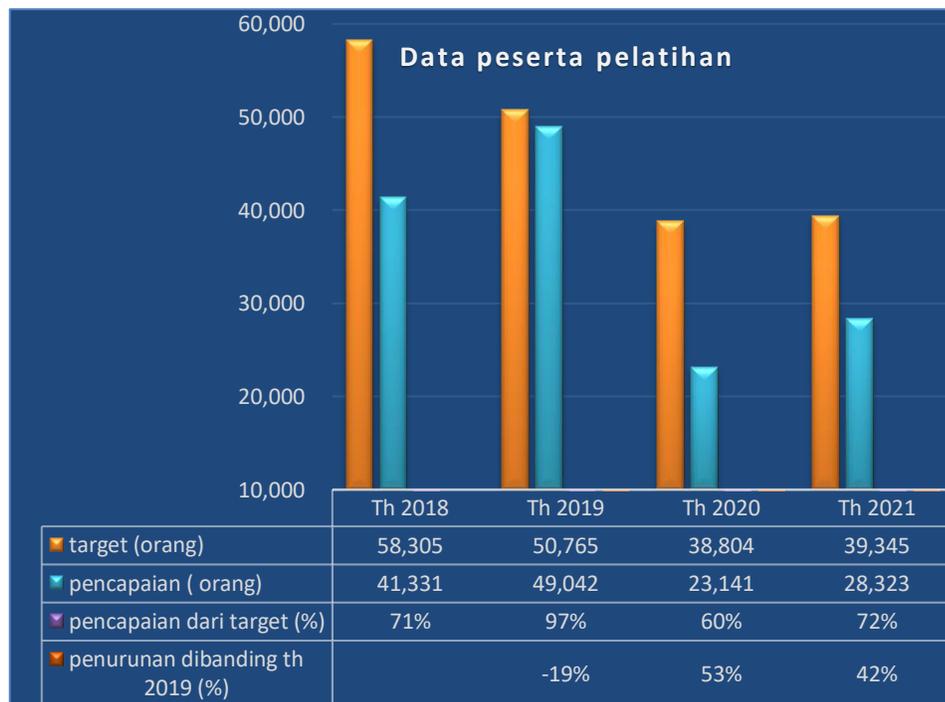
Menurut data, jumlah peserta menurun selama pandemi. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan peserta dengan sistem online. Hal ini berdampak pada pendapatan sektor keuangan di Politeknik Pelayaran Surabaya, yang targetnya meleset. Tabel 4.3 menunjukkan penurunan yang signifikan pada peserta pelatihan.

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Uji Coba Instrumen dan Analisis Analisis instrumental Sebelum memulai proses penelitian,

langkah pertama ini harus diselesaikan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan tingkat kualitas instrumentasi yang akan digunakan dalam penyelidikan. Pertama, calon peserta pelatihan dalam sampel penelitian diwawancarai. Sebagian besar peserta lebih menyukai layanan pendaftaran pendidikan dan pelatihan online daripada sistem online.

Menurut penelitian, pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM pemerintah yang menghalangi calon peserta diklat untuk mendaftar secara langsung, menyebabkan ketidaksiapan. Pelamar aplikasi pendidikan dan pelatihan online. Saat melakukan penelitian, peneliti kemungkinan besar menggunakan data yang terdahulu telah disadalamn oleh unit afiliasi. Dari tabel 4 diatas dapat ditampilkan diagram batang untuk menunjukkan keterkaitannya dengan subjek penelitian. Informasi tersebut dapat ditampilkan dalam grafik berikut



Gambar 5. Diagram Data Peserta dari Tahun 2018 – 2021

Berdasarkan grafik yang membandingkan jumlah peserta di atas, interpretasi spesifik berikut dapat dibuat:

1. Periode sebelum masa pandemi 2018 – 2019

Dengan tingkat keberhasilan 71 persen, dari target pendapatan, 58.305 orang pendaftar pada tahun 2018 dapat dipenuhi dengan 41.331. Pada 2019, target 50.765 peserta dapat tercapai dengan 49.042 orang, yang merupakan tingkat keberhasilan 97 persen dan meningkat sekitar 26 persen dari tahun terdahulu. Target jumlah peserta turun sekitar 7.540 atau sekitar 13% dari tahun terdahulu.

Dari data perbandingan antara kedua tahun tersebut tampak jelas terlihat perbandingan diawal yang dapat diambil kesimpulan awal bahwa pandemic COVID-19 merupakan pemicu turunnya tingkat pendapatan keuangan di UPT layanan diklat Politeknik Pelayaran Surabaya serta berakibat juga terhadap terhambatnya proses pelayanan

2. Masa pandemi periode 2020-2021

Pada tahun 2020, dari penetapan target 38.804 peserta, dengan pencapaian target 23.141 orang dan persentase pencapaian target 60 persen, merupakan peningkatan capaian sekitar 19 persen dari level tahun terdahulu. Target jumlah peserta turun sekitar 7.540 dari tahun terdahulu, yang setara dengan penurunan sekitar 13 poin persentase. Persentase target yang dicapai pada tahun 2021 adalah 72 persen, meningkat sekitar 19 persen dari tingkat pencapaian tahun terdahulu. Targetnya 39.345 peserta, namun yang terhitung mencapai target hanya 28.323 orang. Mulai tahun 2020, targetnya meningkat sekitar 541 peserta atau setara dengan kurang lebih 1 persen. Dari data perbandingan antara kedua tahun tersebut tampak jelas terlihat

perbandingan diawal yang dapat diambil kesimpulan awal bahwa pandemic COVID-19 merupakan pemicu turunnya tingkat pendapatan keuangan di UPT layanan diklat Politeknik Pelayaran Surabaya serta berakibat juga terhadap terhambatnya proses pelayanan

Dari diagram grafik perbandingan jumlah Peserta diatas dapat dijabarkan dengan rincian penjelasan berikut :

3. Masa sebelum pandemi periode tahun 2018 – 2019

Tahun 2018 dengan target peserta sebanyak 58.305 orang dapat dicapai sebanyak 41.331 orang dengan prosesntase pencapaian 71%. Tahun 2019 dari penetapan target 50.765 orang peserta dapat dicapai sebanyak 49.042 orang dengan prosentase pencapaian 97% dengan kenaikan capaian sekitar 26% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya terjadi penurunan target sekitar 7540 peserta atau sekitar 13%.

Dari kedua poin diatas menunjukkan grafik pencapaian target yang masih dalam batas toleransi.

4. Masa pandemi tahun periode 2020-2021

Tahun 2020 dari penetapan target 38.804 orang peserta dengan pencapaian target sebanyak 23.141 orang dengan prosentase pencapaian 60% dengan kenaikan capaian sekitar 19% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya terjadi penurunan target sekitar 7540 peserta atau sekitar 13%.

Tahun 2021 dari penetapan target 39.345 orang peserta dengan pencapaian target sebanyak 28.323 orang dengan prosentase pencapaian 72% dari target dengan kenaikan capaian sekitar 19% dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 terjadi kenaikan target sekitar 541 peserta atau sekitar 1%.

Tabel 5. Pemanding Sebelum dan Dimasa Pandemi Covid-19

Tahun	Sebelum Pandemi			Masa Pandemi			
	Target (orang)	Capaian orang	% dr target	Tahun	Target	Capaian orang	% dr target
2018	58.305	41.331	71%	2020	38.804	23.141	60%
2019	50.765	49.042	97%	2021	39.345	28.323	72%
Total capaian per dua tahun		90.373	83 %	Total capaian per dua tahun		51.464	66%
Penurunan jumlah peserta dari sebelum dan masa Pandemi				38.909 (orang)		- 57%	

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel di atas, jumlah orang yang mengikuti pelatihan di Politeknik Pelayaran Surabaya menurun secara signifikan sebelum dan selama Pandemi Covid-19, sebuah perkembangan yang kemungkinan berdampak pada penurunan pendapatan finansial institusi.

Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat khususnya kepada para peserta peserta diklat maka POLTEKPEL selaku UPT yang menyelenggarakan diklat keterampilan pelaut diberi kewenangan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku badan yang menangani bidang perhubungan sektor laut dibawah kementerian perhubungan untuk menerbitkan atau mencetak sertifikat keahlian pelaut sebagai bukti kompetensi pelaut yang telah melaksanakan dan telah lulus diklat dalam periode tertentu.

Dalam penggunaan kewenangan penerbitan sertifikat POLTEKPEL Surabaya tetap berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai sasatu kesatuan dibawah kementerian perhbungan laut agar terpusat dalam satu database kepelautan hal ini dimaksud untuk menghindari berbagai kecurangan dalam penerbitan sertifikat yang diluar jalur resmi atau illegal.

Peraturan ini mengubah Sertifikasi dan Personil Angkatan Laut (PERMEN) Nomor 70

untuk lebih melayani masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penerbitan sertifikat. Hal itu dikeluarkan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Nomor PM 140 Tahun 2016.

Pada 7 Desember 2016, peraturan menteri yang disetujui oleh Menteri Perhubungan pada 4 November mulai berlaku. Lembaga pelatihan yang berafiliasi dengan Kementerian Perhubungan sekarang dapat menerbitkan sertifikasi pelaut, termasuk sertifikat pengetahuan dan keterampilan, bukan dari Dirjen Perhubungan Laut. Dirjen Perhubungan Laut menerbitkan sertifikat peresmian.

Pelaut harus memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk bekerja di kapal, sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2000 yang mengatur tentang kelautan. Keahlian atau kemampuan dapat ditunjukkan dengan sertifikat kelautan. Dokumen yang sah atau yang diperoleh sesuai dengan hukum diterima. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Organisasi Pelayanan Publik, Politeknik Pelayaran Surabaya menggunakan tarif jasa pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. 05/2014. Untuk memperjalas sistem administrasi maka POLTEKPEL Surabaya

mengeluarkan Harga untuk pelatihan dan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Data Certificete of Proficiency (CoP) dan daftar harga

No	PROGRAM	BIAYA DIKLAT (RP)	REVALIDASI (Rp)
1	BST	1.798.000	420.000
2	AFF	1.262.000	420.000
3	CMT & CMHBT	1.219.000	420.000
4	ECDIS	1.284.000	420.000
5	RADAR	1.340.000	420.000
6	SSO	970.000	420.000
7	ERM	1.275.000	420.000
8	SATSDSD	623.000	420.000
9	ARPA	1.205.000	420.000
10	BST KLM	808.000	420.000
11	PSCRB	965.000	420.000
12	MFA	1.205.000	420.000
13	BOCT	1.405.000	420.000
14	BRM	1.150.000	420.000
15	SAT	635.000	420.000
16	AOTCO	1.735.000	420.000
17	ACT	1.470.000	420.000
18	IMDG-CODE	1.255.000	420.000
19	ISM-CODE	585.000	420.000
20	MC	1.405.000	420.000
21	GMDSS	2.286.000	950.000
22	RATING DEK	1.635.000	420.000
23	RATING ENGINE	1.624.000	420.000
24	ABLE DECK	2.492.000	420.000
25	ABLE ENGINE	2.558.000	420.000
27	ALGT	1.463.000	420.000
28	BST KLM	750.000	420.000

Kementerian Perhubungan (PM 140) telah mengeluarkan peraturan baru (PERMEN) Nomor 70 Tahun 2013 untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan maritim dan kredensial maritim.

Menteri Perhubungan menyetujui peraturan ini pada 4 November 2016, dan mulai berlaku pada 7 Desember. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini dapat memberikan sertifikat pengetahuan dan keahlian kepada organisasi yang berada di bawah pengawasan (izin) Kementerian Perhubungan. DJPL akan terus

menerbitkan sertifikat peresmian sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Menurut PP No. 7 Tahun 2000 yang mengatur masalah kelautan, pelaut harus memiliki pengetahuan atau keterampilan agar dapat beroperasi sebagai ABK di kapal. Bukti kemampuan seseorang dalam industri maritim dapat ditemukan dalam sertifikat kelautan. Agar suatu dokumen dianggap sah, harus diperoleh secara sah. Tarif jasa pendidikan dan pelatihan di Politeknik Pelayaran Surabaya didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2014 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah. Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Pelayanan Publik. Berikut adalah biaya pelatihan dan pendidikan:

Politeknik Pelayaran Surabaya memberikan ijazah kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan mencapai persyaratan kelulusan agar memenuhi kriteria pelayanan DKP (Diklat Keterampilan Kelautan). Digunakan teknik cetak standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL).

Dari data tabel diatas terdapat 28 jenis sertifikat keterampilan khusus pelaut yang dapat diperoleh secara berjenjang, yang mana setiap pelaut yang akan bekerja disebuah kapal harus memiliki sertifikat dasar yang berlaku selama lima tahun dan bisa diperbaharui (revalidasi) dengan beberapa persyaratan diantaranya : Akte lahir (fotocopy), Sertifikat yang akan di revalidasi & fotocopy, Foto copy BST, Fotocopy EKTP & Asli,

Fotocopy ijasah laut terakhir, Foto hitam putih 3x4.

Untuk memenuhi standar layanan penyelenggaraan dan pengadaan Diklat Keahlian Pelaut (DKP) maka Politeknik Pelayaran Surabaya, menerbitkan sertifikat bagi setiap peserta yang telah mengikuti diklat dan memenuhi standar kelulusan sebagai peserta. Adapun mekanisme atau prosedur pencetakan mengikuti standar peraturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Sebagai sampel perbandingan peneliti mengambil dua periode tahun sebelum Pandemi Covid-19 dan dua periode tahun dimasa Pandemi Covid-19 yang merupakan perbandingan yang dapat menguatkan penelitian dari obyek yang diteliti yaitu tingkat pengaruh dampak Pandemi Covid-19 terhadap pendapatan di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Dalam peninjauan data ada beberapa komponen data yang harus diadakan perbandingan sehingga penelitian tetap dilanjutkan. Mengacu pada data dari sumber terkait

Tabel 7 Data Pemakaian Blanko Sertifikat 2018-2021

NO	JENIS DIKLAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	REVALIDASI	645	1041	974	951	1258	364	796	587	1469	2281	1368	596	12330
2	ABLE DECK	120	101	105	21	97	10	110	11	133	77	9	111	905
3	ABLE ENGINE	79	4	43	7	48	7	65	6	66	45	8	44	422
4	ACT	3	5	4	3	16	1	7	2		10	4	5	60
5	AFF	125	320	375	626	331	78	205	90	369	452	371	508	3850
6	ALGT	5	3	65	2	8	2	3	2	6	6	7	4	113
7	AOTCO	30	22	19	31	52	7	20	12	17	24	25	16	275
8	ARPA	16	44	27	11	13		39	15	7	40	80	207	499
9	BLGT	13	176	59	74	4	1	3	28	1	10	6	3	378
10	BOCT	337	190	100	55	62	10	85	57	4	70	5	40	1015
11	BRM	21	31	134	13	15	21	13	145	15	124	11	40	583
12	BSTKLM					235		224			97	548	352	1456
13	BST	254	260	695	283	321	215	205	139	215	715	288	386	3976
14	CMT&CMHBT	305	436	242	294	118	73	264	142	145	582	363	312	3276
15	ECDIS	19	7	43	111	5	8	10	18	6	122	23	12	384
16	ERM	117	14	60	101	40	19	10	154	40	92	16	12	675
18	IMDG-CODE	24	13	122	12	8	13	14	33	6	98	22	21	386
20	MC	128	119	144	127	73	1	57	303	85	364	64	10	1475
21	MFA	42	142	92		77	40	177	142	224	304	122	278	1640
22	PSCRB	177	95	185	150	203	98	236	193	141	333	109	53	1973
23	RADAR	21	51	13	18	7	20	31	17	8	30	43	249	508
24	RATING DEK RATING ENGINE	2	569	51	70	67	11	115	119	6	5	74	165	1254
25	ENGINE	54	319	66	29	20		45	62		1	36	59	691
26	SAT	155	519	456	667	448	244	525	253	472	845	221	613	5418
27	SATSDSD	29	98	99	112	132	38	164	110	77	181	78	61	1179
28	SSO	129	103	94	98	49	10	26	33	45	216	28	38	869
	Sub Total	2850	4682	4267	3866	3707	1291	2653	2673	3557	7124	3929	4195	45590

NO	JENIS DIKLAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	REVALIDASI	665	1041	974	951	1258	364	796	587	1469	2281	1368	596	12350
2	ABLE DECK	106	101	105	21	97	10	110	11	133	n	9	111	891
3	ABLE ENGINE	79	4	43	7	48	7	65	6	66	45	8	44	422
4	ACT	3	5	4	3	16	1	7	2		10	4	5	60
5	AFF	125	320	375	626	331	78	205	90	369	592	371	508	3990
6	ALGT	5	3		2	8	2	3			6	7	4	40
7	AOTCO	30	22	19	31	52	7	20	12	17	24	25	16	275
8	ARPA	16	44	27	11	13		39	15	7	40	80	207	499
9	BLGT	13	176	59	74	4	1	3	28	1	10	6	3	378
10	BOCT	337	190	100	55	62	10	85	57	38	70	5	40	1049
11	BRM	21	31	1,34	13	15	21	13	145	15	131	11	40	590
12	BST KLM					235		224			97	548	442	1546
13	BST	452	260	695	283	321	215	205	139	215	715	3n	386	4263
14	CMT&CMHBT	305	436	242	294	118	73	264	142	145	582	363	312	3276
15	ECDIS	19	7	43	111	5	8	10	18	6	122	23	12	384
16	ERM	117	14	60	101	40	19	10	154	40	92	16	12	675
18	IMDG-CODE	24	13	122	12	8	13	14	33	6	98	22	21	386
20	MC	128	119	144	127	73	1	57	303	85	364	64	10	1475
21	MFA	42	142	92		n	40	in	142	224	304	122	278	1540
22	PSCRB	1n	95	185	150	203	98	236	193	141	333	109	53	1973
23	RADAR	21	51	13	18	7	20	31	17	8	30	43	249	508
24	RATING DEK	2	569	51	70	67	11	115	119	6		74	165	1249
25	RATING ENGINE		319	65	29	20		45	62		1	36	59	637
26	SAT	155	519	456	657	448	244	421	253	472	845	221	613	5314
27	SATSDSD	29	98	99	112	132	38	164	110	n	181	78	61	1179
28	SSO	129	103	94	98	49	10	26	33	45	216	28	38	869
	Sub Total	3000	4682	4202	3865	3707	1291	2549	2671	3585	7266	4018	4285	45918

JENIS		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	REV AUDAS I	1026	1243	1109	1527	1107			82	1230	849	986		9159
2	ABLE DECK	65		46	198	3		74	52	1	42	5		486
3	ABLE ENGINE	33		30	93			50	18		22	6		252
4	ACT	4	5	10	13	2		10	20	15	12	98		189
5	AFF	139	151	124	431	47	2	220	184	186	135	5		1624
6	ALGT	4	5	4	8	3		2	9	12	5	21		73
7	AOTCO	15	21	29	29	8		11	54	6	33	24		230
8	ARPA	193	24	52	39	12	18	22	39	38	38	193		668
9	BLGT		193	257	7	7		8	8	4	9	231		724
10	BOCT	36	231	328	86	16	5	40	47	102	83	32		1006
11	BRM	20	32	47	46	52		9	26	229	35	65		561
12	BSTKLM				132	86	86					134		438
13	BST	73	134	219	270	46		175	311	274	253	289		2044
14	CMT&CMHBT	16	506	286	85	27		142	59	143	103	30		1397
15	ECDIS	13	30	29	21	117		9	38	34	143	28		462
16	ERM	5	28	51	84	24	15	123	176	43	34	44		627
18	IMDG-CODE	7	44	7	72	4		42	56	66	5	28		331
20	MC	81	28	61	102	106		129	184	285	74	97		1147
21	MFA	290	97	162	140	61		72	82	120	169	190		1383
22	PSCRB	113	190	137	282	117	8	7	167	179	191	34		1425
23	RADAR	203	34	57	46	8		27	28	42	32	48		525
24	RATING DEK	75	48	81	81	83	23	6	135	20	135	12		699
25	RATING ENGINE	26	18	27	26	44	8		56	35	39	65		344
26	SAT	56	143	202	423	67	1	230	222	318	234	122		2018
27	SATSDSD	85	93	224	157	49	4	88	131	190	151	39		1211
28	SSO	22	39	89	70	169		23	74	63	180	47		776
	Sub Total	2600	3337	3668	4468	2265	170	1519	2258	3635	3006	2873	0	29799

Data di atas membandingkan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Jumlah sertifikat yang dihasilkan mengalami penurunan sejak sebelum

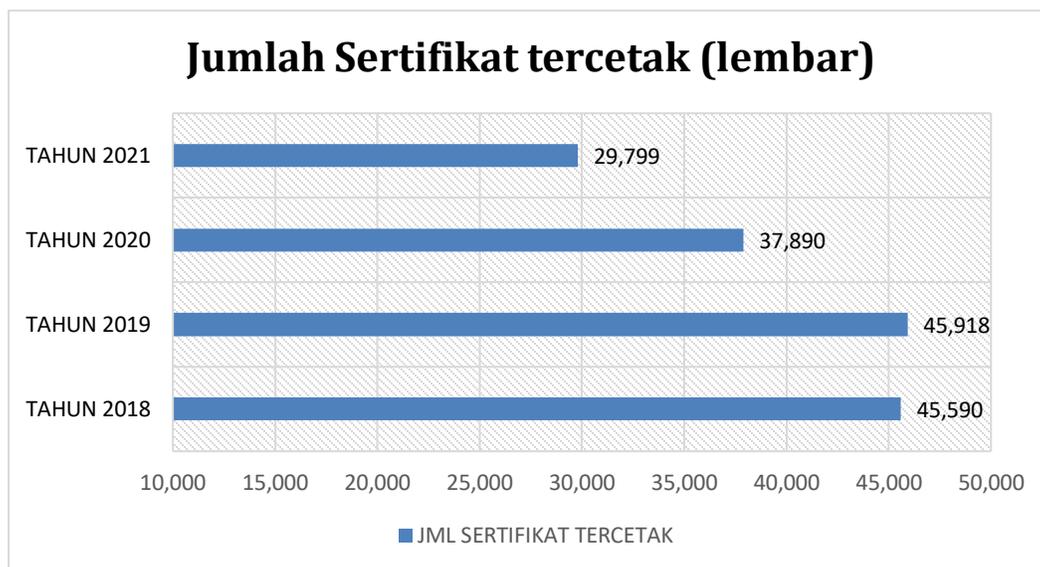
dan selama pandemi Covid-19. tabel di bawah ini menjelaskan:

Tabel 8. Data Blanko Sertifikat yang Tercetak dari th 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Sertifikat (Lembar)	Kumulatif	Prosesntase Penurunan Quantity	keterangan
1	2018	45.590			
2	2019	45.918	91508		Sebelum Pandemi
3	2020	37.890			
4	2021	29.799	67689	26%	Masa Pandemi

Dari data table diatas dapat digambarkan grafik penurunan jumlaaj sertifikat yang tercetak dan jumlah peosentase perbandingan antar

sebelum dan sesudah pandemic tergambar dalam bentuk diagram berikut diagram berikut :



Gambar 6. Grafik pencetakan sertifikat (conpetency of Proficiency)

1. Proses Pelaporan dan Pendapatan Keuangan

Dalam status Badan Layanan Umum, Politeknik Pelayaran Surabaya merupakan lembaga pendidikan (BLU).

Badan Layanan Umum (BLU) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan

pelayanan publik. Jasa tersebut dapat berupa barang/barang dan/atau perbuatan bermanfaat yang dijual tanpa keuntungan. Badan Layanan Umum menekankan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah pusat dan daerah menggunakan BLU. BLU adalah Badan Layanan Umum Daerah di wilayah ini (disingkat BLUD). POLTEKPEL Surabaya

adalah lembaga pelayanan publik yang dibina oleh kementerian.

Latar Belakang

Metode penganggaran tradisional di negara bagian perlu diganti dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Ini merupakan syarat reformasi keuangan negara. Karena meningkatnya tuntutan yang ditempatkan pada anggaran tetapi berkurangnya sumber daya yang tersedia dari pemerintah, reformasi ini diperlukan dan esensial. Pemerintah kontemporer di berbagai negara bertanggung jawab untuk melaksanakan penganggaran ini. Mendapatkan pekerjaan di pemerintahan adalah metode yang terbukti benar untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah.

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan penganggaran berbasis kinerja, sedangkan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69 memberikan acuan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan publik dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. 2003 dan 2004 mengeluarkan dua undang-undang.

Kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan praktik pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Karakteristik

Badan Layanan Umum adalah instansi pemerintah yang menyediakan barang dan tindakan bermanfaat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini adalah kualitas yang membedakannya dari unit organisasi atau lembaga pemerintah lainnya, seperti BLU, yang merupakan contoh dari jenis lembaga pemerintah lainnya. Hal inilah yang membedakan Badan Layanan Umum dengan unit organisasi atau instansi pemerintah lainnya yang ada saat ini. Karena BLU menyediakan layanan dan

kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, organisasi berada dalam posisi untuk menghasilkan pendapatan dengan mengumpulkan biaya dari individu yang menggunakan produk dan layanannya. Hal ini memungkinkan BLU untuk melanjutkan pekerjaan amalnya. Sementara itu, uang yang terkait dengan BLU dianggap sebagai Pendapatan Bukan Pajak atau PNBP, sedangkan pendapatan yang dihasilkan oleh BLUD di suatu daerah dianggap sebagai PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang sah. Ada banyak organisasi yang bekerja di dalam birokrasi pemerintah yang fungsi utamanya bukan sebagai penyedia jasa atau barang atau melakukan tindakan-tindakan yang bersifat membantu. Misalnya, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan, penegakan hukum dan peradilan, pertahanan, dan bidang lain yang serupa, sebagai konsekuensi dari perubahan ini, organisasi tersebut tidak akan menerima pendapatan langsung dari masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka berikan.

BLU perlu menerapkan praktik bisnis yang beretika dan menempatkan misi perusahaan di atas menghasilkan keuntungan. Ini adalah kualitas yang sangat unik dari lembaga pemerintah karena diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis yang sebanding dengan yang biasanya digunakan oleh bisnis dan bagian lain dari sektor swasta. BLU dirancang sebagai lembaga untuk sektor komersial; namun tidak boleh mengejar keuntungan (not-for-profit).

BLU dioperasikan dengan fokus untuk memaksimalkan efisiensi dan outputnya. Sifat ini sangat berbeda dengan instansi pemerintah biasa yang mengutamakan daya serap tinggi dalam memberikan pelayanannya, terlepas dari apakah tindakan tersebut berhasil mencapai tujuan atau No. Penyerapan bukanlah tujuan di BLU karena surplus atau kelebihan dapat didaur ulang ke dalam operasi organisasi tahun depan untuk meningkatkan tingkat layanan yang diberikannya. Kegiatan BLU dilaksanakan dengan otonomi dan fleksibilitas yang tinggi, khususnya

di bidang pengelolaan uang, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan dan pembelian aset dan barang, serta pengelolaan aset dan barang tersebut.

Sebagian besar undang-undang pengelolaan keuangan negara tidak berlaku untuk BLU. Untuk dapat menentang aturan keuangan negara, BLU telah diberikan semangat otonomi ini. BLU, misalnya, diperbolehkan menggunakan pendapatan sendiri (PNBP untuk BLU Pusat atau PAD lain yang sah untuk BLUD).

Prinsip

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, BLU berfungsi sebagai unit kerja kementerian negara, lembaga, dan pemerintah daerah. Terserah lembaga induk dari masing-masing lembaga untuk memutuskan bagaimana BLU dikelola.

Kedudukan hukum BLU tidak lepas dari kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai lembaga utama karena BLU merupakan proses penyusunan tujuan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan BLU merupakan institusi utama. Sebagai hasil dari manfaat pelayanan yang dihasilkan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota menunjuk BLU untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan BLU harus bertanggung jawab atas pengelolaannya. (BLUD).

Badan Layanan Umum menjalankan misinya tanpa mengutamakan mencari keuntungan, sementara pada saat yang sama melakukan upaya untuk memperluas sumber pendapatannya. Penyusunan dan penyajian rencana kerja laporan keuangan kinerja BLU tidak terlepas dari penyusunan dan penyajian rencana kerja dan perkiraan, serta kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD./laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Badan Layanan

Umum dapat mengatur dan memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan.

Persyaratan menjadi BLU

Tidak semua unit kerja yang memiliki PNBP dapat berubah menjadi unit kerja BLU. Satuan kerja yang memiliki PNBP harus memenuhi beberapa standar sebelum dapat menjadi satuan kerja BLU, antara lain:

Persyaratan Substantif:

melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama yang berhubungan dengan:

Menyediakan barang atau jasa yang berguna untuk pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, administrasi pendidikan, dan pelayanan penelitian dan pengembangan (R&D), Penatausahaan wilayah atau kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau pelayanan publik, seperti kewenangan atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Pengelolaan anggaran khusus, seperti pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, dilakukan untuk membantu perekonomian atau masyarakat secara keseluruhan.

Ada beberapa Persyaratan Teknis diantaranya, Kinerja pelayanan dalam proses tugas pokok dan fungsi harus dikelola oleh BLU dan hasilnya harus ditingkatkan berdasarkan apa yang terbaik menurut menteri, pimpinan lembaga, atau kepala SKPD, Seperti terlihat dalam dokumen penetapan BLU yang diusulkan, unit kerja tersebut terlihat baik-baik saja secara finansial.

Yang berkaitan dengan Persyaratan Administratif seperti, Pernyataan mampu meningkatkan kinerja, keuangan, dan penggunaan layanan kepada masyarakat, Pengaturan manajemen dan strategi bisnis, Laporan keuangan dasar, Standar pelayanan minimal, laporan pemeriksaan akhir atau pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh pihak independen.

Politeknik Pelayanan Surabaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaporan keuangan untuk menjaga akurasi pelaporan dan kinerja staf. Gelar Kawasan Bebas Korupsi (WBK) Politeknik Pelayaran Surabaya 2019 membuktikan hal tersebut. Politeknik Pelayaran Surabaya memenuhi banyak standar sebagai penyelenggara PSA (BLU).

1. Pembahasan

Politeknik Pelayaran Surabaya menyelenggarakan Pelatihan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP) yang menjadi salah satu sumber pendapatan BLU yang mana didalamnya telah ditetapkan tarif layanan diklat terhadap jenis-jenis diklat sebagai ajuan dalam penerapan harga terhadap konsumen atau peserta. Agar proses pelaporan pendapatan keuangan berjalan transparansi maka alur atau prosedur mulai dari pencatatan calon peserta sebagai pendaftar hingga pembayaran dan pelatihan dilaksanakan semua dicatatkan melalui sistem informasi yang

terstruktur, transparan dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk pembukuan laporan keuangan oleh unit terkait.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan:

Tabel 8 Tarif Diklat Revalidasi Politeknik Pelayaran Surabaya

No	PROGRAM	BIAYA DIKLAT (RP)	REVALIDASI (Rp)
1	BST	1.798.000	420.000
2	AFF	1.262.000	420.000
3	CMT & CMHBT	1.219.000	420.000
4	ECDIS	1.284.000	420.000
5	RADAR	1.340.000	420.000
6	SSO	970.000	420.000
7	ERM	1.275.000	420.000
8	SATSDSD	623.000	420.000
9	ARPA	1.205.000	420.000
10	BST KLM	808.000	420.000
11	PSCRIB	965.000	420.000
12	MFA	1.205.000	420.000
13	BOCT	1.405.000	420.000

14	BRM	1.150.000	420.000
15	SAT	635.000	420.000
16	AOTCO	1.735.000	420.000
17	ACT	1.470.000	420.000
18	IMDG-CODE	1.255.000	420.000
19	ISM-CODE	585.000	420.000
20	MC	1.405.000	420.000
21	GMDSS	2.286.000	950.000
22	RATING DEK	1.635.000	420.000
23	RATING ENGINE	1.624.000	420.000
24	ABLE DECK	2.492.000	420.000
25	ABLE ENGINE	2.558.000	420.000
27	ALGT	1.463.000	420.000
28	BST KLM	750.000	420.000

Tabel 9. Rincian Pendapatan (Rp) Diklat Keterampilan Pelaut (DKP)

No	Jenis Diklat	Pendapatan per Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	REVALIDA SI	Rp5.178.600.000	Rp5.187.000.000	Rp5.911.920.000	Rp3.846.780.000
2	ABLE DECK	Rp2.255.260.000	Rp2.220.372.000	Rp1.268.428.000	Rp1.211.112.000
3	ABLE ENGINE	Rp1.079.476.000	Rp1.079.476.000	Rp680.428.000	Rp644.616.000
4	ACT	Rp88.200.000	Rp88.200.000	Rp95.550.000	Rp277.830.000
5	AFF	Rp4.858.700.000	Rp5.035.380.000	Rp3.382.160.000	Rp2.049.488.000
6	ALGT	Rp165.319.000	Rp58.520.000	Rp54.131.000	Rp106.799.000
7	AOTCO	Rp477.125.000	Rp477.125.000	Rp338.325.000	Rp399.050.000
8	ARPA	Rp601.295.000	Rp601.295.000	Rp360.295.000	Rp804.940.000
9	BLGT	Rp453.600.000	Rp453.600.000	Rp668.400.000	Rp868.800.000
10	BOCT	Rp1.426.075.000	Rp1.473.845.000	Rp1.624.180.000	Rp1.413.430.000
11	BRM	Rp670.450.000	Rp678.500.000	Rp599.150.000	Rp645.150.000
12	BST KLM	Rp1.092.000.000	Rp1.159.500.000	Rp39.750.000	Rp328.500.000
13	BST	Rp7.148.848.000	Rp7.664.874.000	Rp5.642.124.000	Rp3.675.112.000
14	CMT & CMHBT	Rp2.647.008.000	Rp2.647.008.000	Rp1.999.800.000	Rp1.128.776.000
15	ECDIS	Rp468.096.000	Rp468.096.000	Rp463.220.000	Rp563.178.000
16	ERM	Rp866.700.000	Rp866.700.000	Rp869.268.000	Rp805.068.000
18	IMDG- CODE	Rp882.396.000	Rp882.396.000	Rp877.824.000	Rp756.666.000
20	MC	Rp2.072.375.000	Rp2.072.375.000	Rp1.863.030.000	Rp1.611.535.000

21	MFA	Rp1.976.200.000	Rp1.976.200.000	Rp1.731.585.000	Rp1.666.515.000
22	PSCRB	Rp1.903.945.000	Rp1.903.945.000	Rp1.335.560.000	Rp1.375.125.000
23	RADAR	Rp680.720.000	Rp680.720.000	Rp489.100.000	Rp703.500.000
	RATING				
24	DEK	Rp2.050.290.000	Rp2.042.115.000	Rp1.314.540.000	Rp1.142.865.000
	RATING				
25	ENGINE	Rp1.122.184.000	Rp1.034.488.000	Rp592.760.000	Rp558.656.000
26	SAT	Rp3.440.430.000	Rp3.374.390.000	Rp1.917.065.000	Rp1.281.430.000
27	SATSDSD	Rp734.517.000	Rp734.517.000	Rp635.460.000	Rp754.453.000
28	SSO	Rp842.930.000	Rp842.930.000	Rp680.940.000	Rp752.720.000
TOTAL		Rp31.557.184.000	Rp32.034.619.000	Rp24.042.376.000	Rp21.235.469.000
Akumulasi		Rp63.591.803.000,-		Rp45.277.845.000,-	
PERIODE		SEBELUM PANDEMI		MASA PANDEMI	

Dari tabel diatas terlihat angka penurunan pendapatan yang sangat signifikan dari sebelum Pandemi *Covid-19* dan di masa Pandemi *Covid-*

19. Ini dapat digambarkan melalui grafik pada diagram batang berikut :



Gambar 7. Diagram Pendapatan Keuangan Tahun 2018-2021

Dari diagram diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masa sebelum pandemi periode tahun 2018 – 2019

Tahun 2018 dengan target pencapaian pendapatan (Rp) sejumlah Rp38.156.485.000,- dapat dicapai sejumlah Rp31.557.184.000,- dengan prosesntase pencapaian 79% dari target

yang ditetapkan

Tahun 2019 penetapan target Rp37.586.821.000,- dapat dicapai sebanyak Rp32.034.619.000,- prosentase pencapaian 83% dengan kenaikan capaian sekitar 4% dari tahun sebelumnya. terjadi penurunan target sekitar Rp5.696.640.000,- atau sekitar 1%.

Dari kedua poin diatas menunjukkan grafik pencapaian target yang masih dalam batas toleransi.

2. Masa pandemi tahun periode 2020-2021

Tahun 2020 dari penetapan target Rp26.598.540.000,- dengan pencapaian target ditahun yang sama sebesar Rp24.042.376.000,- dengan prosentase pencapaian 89% dengan dengan selisih capaian dari tahun 2019 sekitar Rp7.992.243.000,-capaian atau 25%. Dari tahun sebelumnya terjadi penurunan target sekitar Rp10.988.281.000,- atau sekitar 29%.

Tahun 2021 dari penetapan target

Rp26.782.750.000 dengan pencapaian target sebanyak Rp21.235.469.000 dengan prosentase pencapaian 74% dari target, penurunan capaian sekitar 15% dari tahun sebelumnya (2020).

Akumulasi perbandingan pendapatan 2018-2019 dengan 2020-2021 adalah :

Dua tahun periode sebelum pandemi (2018-2019) dengan akumulasi target pendapatan keuangan dari diklat yang diselenggarakan adalah Rp75.743.306.000,- dengan pencapaian sekitar Rp63.591.803.000,- atau 84% dari target.

Dua tahun periode dimasa pandemi (2020-2021) dengan akumulasi target pendapatan keuangan dari diklat yang diselenggarakan adalah Rp53.381.290.000,- dengan pencapaian sekitar Rp45.277.845.000,- atau 85% dari target Selisih pendapatan keuangan Politeknik Pelayaran Surabaya dari pelaksanaan diklat dua tahun sebelum dan dua tahun masa pandemi sebesar:

Table 10. Pendapatan sebelum dan Sesudah Pandemic

	TAHUN 2018 S/D 2019	TAHUN 2020 S/D 2021
TARGET	Rp75.743.306.000,-	Rp53.381.290.000,-
CAPAIAN	Rp63.591.803.000,-	Rp45.277.845.000,-
SELISIH TARGET		Rp22.362.016.000,-
SELISIH PENDAPATAN		Rp18.313.958.000,-

Akibatnya, jelas dari studi kasus ini bahwa pelaksanaan pelatihan di Politeknik Pelayaran Surabaya dua tahun sebelum dan dua tahun selama pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan finansial sebesar Rp. 18.313.958.000. ini adalah jumlah uang yang hilang dalam pendapatan selama empat tahun itu.

Perkiraan dalam analisis pendapatan keuangan di Politeknik Pelayaran Surabaya perlu melihat beberapa aspek selain factor X, diantaranya factor pendanaan dalam setiap kegiatan. Misalnya perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab tersebut di atas, jelaslah bahwa situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia maupun negara-negara lain di dunia telah menimbulkan sejumlah masalah baik bagi perekonomian maupun sektor kesehatan. Ketika ekonomi global terhambat, perekonomian Indonesia juga akan merasakan dampaknya, khususnya perlambatan pertumbuhan.

Salah satu lembaga pemerintah yang membidangi pendidikan ilmu kelautan adalah Politeknik Perkapalan Surabaya yang juga memberikan layanan Pelatihan Keterampilan dan Keahlian Kelautan (DKKP) kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah yang menerapkan lockdown atau PSBB sehingga aktivitas masyarakat dibatasi, penggunaan sistem yang sepenuhnya berbasis internet (online), yang menyebabkan penurunan peserta karena tidak memahami prosedur yang ada, dan lain-lain. semua faktor tersebut berkontribusi terhadap penurunan pendapatan finansial di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Saran

Peneliti memberikan beberapa

rekomendasi berdasarkan analisis dan tinjauan pustaka yang dilakukannya selama melakukan penelitian ini, Sehingga penelitian ini dilanjutkan, dengan memperhatikan pandemi Covid-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, serta dampaknya terhadap perekonomian, dengan meneliti Efektivitas Strategi E-Marketing Pasca Paparan Pandemi Covid-19.

Sebagai pusat pelatihan kepelautan di Jawa bagian timur maka seyogyanya UPT POLTEKPEL Surabaya selalu meningkatkan bentuk pelayanan baik peningkatan berupa sarana dan prasarana juga peningkatan dalam sektor kualitas tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan dapat bersaing dalam era digital dengan pemefatan secara maksimal penggunaan internet dan aplikasi yang berbasis layanan diklat sehingga memudahkan para peserta mengakses layanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan UPT itu sendiri. Mengetahui POLTEKPEL Surabaya merupakan salah satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menghasilkan Sumber Daya Manusia transportasi laut, maka masyarakat Indonesia terpacu untuk meningkatkan kualitas dalam menggunakan internet di era digital untuk terus menggunakan jasa Politeknik Pelayaran Surabaya.